



Politik Bahasa Islam: Kontestasi Otoritas, Identitas, dan Etos dalam Pemikiran Islam Kontemporer

Rahmat Satria Dinata¹, Junizar Suratman², Eka Putra Wirman³

¹rahmatsatria@uinib.ac.id, UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

²junizarsuratman@uinib.ac.id, UIN Imam Padang, Indonesia

³ekaputrawirman@uinib.ac.id, UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rahmatsatria@uinib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme dalam Islam kontemporer melalui kerangka politik bahasa Islam Bernard Lewis, yang memandang bahasa bukan sekadar medium komunikasi, melainkan arena perebutan makna, legitimasi, otoritas keagamaan, serta pembentukan identitas dan etos sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur analitis terhadap karya-karya representatif ketiga arus pemikiran, dengan pembacaan kritis yang diperdalam melalui elemen Analisis Wacana Kritis Fairclough pada level teks dan fungsi sosial-ideologisnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tradisionalisme meneguhkan otoritas keagamaan transenden melalui kesinambungan sanad dan bahasa turāth, yang membentuk identitas keislaman berbasis kontinuitas tradisi serta etos adab keilmuan. Neo-Tradisionalisme menegosiasikan otoritas penafsiran dengan merevitalisasi terminologi klasik dalam ruang global-digital, sehingga melahirkan identitas keislaman hibrid dan etos revitalisasi berbasis jejaring. Sementara itu, Radikalisme mengklaim otoritas kebenaran tunggal melalui bahasa pemurnian sebagai instrumen eksklusi dan konfrontasi ideologis, yang menghasilkan etos puritan dan konfrontatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan politik bahasa sebagai ruang analitis bersama untuk membaca kontestasi otoritas, identitas, dan etos Islam kontemporer, serta membuka peluang kajian lanjutan melalui analisis media digital dan perbandingan lintas budaya.

Kata Kunci: *Islam Kontemporer; Neo-Tradisionalisme; Pemikiran; Politik Bahasa; Radikalisme; Tradisionalisme*

Abstract

This study analyzes Traditionalism, Neo-Traditionalism, and Radicalism in contemporary Islam through Bernard Lewis's framework of Islamic language politics, which understands language not merely as a medium of communication but as an arena of struggle over meaning, legitimacy, religious authority, and the formation of identity and social ethos. Employing a qualitative approach based on an analytical literature review of representative works from the three intellectual currents, the study is informed by critical reading using elements of Fairclough's Critical Discourse Analysis at the levels of textual construction and socio-ideological function. The findings show that Traditionalism reinforces transcendent religious authority through the continuity of sanad and the language of turāth, shaping an Islamic identity grounded in the continuity of tradition and an ethos of scholarly adab. Neo-Traditionalism negotiates interpretive authority by revitalizing classical terminology within global-digital spaces, producing a hybrid Islamic identity and a network-based ethos of revitalization. Radicalism, by contrast, claims exclusive truth authority through the language of purification as an instrument of exclusion and ideological confrontation, resulting in a puritan and confrontational ethos. The originality of this study lies in its use of language politics as a shared analytical space to examine the contestation of authority, identity, and ethos in contemporary Islam, while opening avenues for future research through digital media analysis and cross-cultural comparison.

Keywords: *Contemporary Islam; Language Politics; Neo-Traditionalism; Radicalism; Traditionalism; Thought*

1. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, wacana keislaman global menunjukkan pergeseran yang signifikan, ditandai oleh meningkatnya pertarungan identitas antar kelompok Muslim dalam ruang publik, baik di dunia Arab, Barat, maupun Asia Tenggara. Perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi diskursus keagamaan telah menciptakan lanskap baru di mana otoritas keagamaan tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan tersebar melalui media digital, lembaga pendidikan, dan jaringan ulama lintas negara (R. Hidayatullah, 2024; Nurhamidin et al., 2025; Zuhri, 2021). Dalam konteks ini, bahasa keagamaan berfungsi tidak hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen politik simbolik untuk menegaskan otentisitas, legitimasi, dan superioritas moral suatu kelompok (Abadi, 2024; Bourdieu, 1991, 2020). Fenomena tersebut tampak jelas dalam dinamika arus pemikiran Islam kontemporer seperti Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme, yang masing-masing memanfaatkan bahasa dan simbol teologis untuk membangun serta mempertahankan klaim otoritas dan identitas keislaman.

Kajian mengenai arus pemikiran Islam kontemporer yang berkaitan dengan persoalan identitas dan otoritas keagamaan telah banyak dibahas oleh para sarjana, baik dari perspektif filsafat, teologi, maupun sosiologi. Dalam tradisi intelektual Barat, René Guénon, Frithjof Schuon, dan Seyyed Hossein Nasr menempatkan Tradisionalisme sebagai bentuk resistensi metafisik terhadap krisis modernitas dan sekularisme, dengan menegaskan bahwa *Tradition* merupakan sumber kebenaran abadi yang melandasi seluruh agama otentik (Guénon, 2001, 2009; Nasr, 1994; Schuon, 2011). Mark Sedgwick melalui karyanya *Against the Modern World* menjelaskan bagaimana aliran ini berkembang menjadi gerakan intelektual transnasional yang menentang rasionalisme modern dan menghidupkan kembali kebijaksanaan sakral atau *Sophia Perennis* (Sedgwick, 2004). Sementara itu, Walaa Quisay dan Brendan Peter Newlon mengalihkan perhatian pada fenomena kebangkitan otoritas pra-modern dalam konteks masyarakat Muslim diaspora Barat. Quisay menafsirkan Neo-Tradisionalisme sebagai upaya sadar untuk merevitalisasi otoritas keilmuan Sunni klasik melalui bahasa *aṣālah* (otentisitas) yang berhadapan dengan Salafisme dan modernisme sekuler, sedangkan Newlon mengamati terbentuknya jaringan Muslim Amerika yang menghidupkan kembali praktik sanad, mazhab, dan tasawuf di tengah modernitas digital (Newlon, 2017; W. Quisay, 2019; W. H. Quisay, 2023, 2023).

Adapun kajian tentang Radikalisme, seperti yang dilakukan oleh John Esposito, Gilles Kepel, Azyumardi Azra, Jati, Qodir, Rahman, dan Muhaimin, menyoroti dimensi ideologis dan politik dari gerakan puritan yang mengedepankan wacana pemurnian (*tathhīr*), penolakan terhadap bid'ah, serta penggunaan istilah *takfīr* untuk menetapkan batas iman (Azra, 2019; Esposito, 2003; Kepel, 2002, 2003; Muhaimin, 2020; Rahman, 2020). Dalam konteks Indonesia, Greg Barton menelusuri bagaimana dinamika pesantren dan munculnya gerakan post-tradisionalisme serta

Islam Nusantara menjadi artikulasi lokal dari wacana neo-tradisionalisme global (Barton, 2005) dan juga terkait radikalisme (Azra, 2016; Jati, 2017; Qodir, 2016; Syahril, 2020).

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme, belum banyak penelitian yang menempatkan ketiganya dalam satu kerangka analitis bersama dengan menyoroti politik bahasa Islam sebagai arena kontestasi otoritas dan identitas keagamaan. Sebagian besar studi masih memandang ketiga arus tersebut sebagai entitas yang berdiri sendiri dalam perspektif teologis, historis, atau sosiologis, tanpa mengkaji secara memadai bagaimana bahasa berfungsi sebagai mekanisme kuasa yang mempertautkan dan mempertentangkan ketiganya dalam satu medan wacana keislaman kontemporer.

Berangkat dari kerangka politik bahasa Islam Bernard Lewis, penelitian ini memandang bahasa sebagai arena perebutan makna dan legitimasi, tempat otoritas keagamaan dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan (Lewis, 1991). Dalam perspektif ini, istilah, metafora, dan kategori keagamaan tidak hanya merepresentasikan ajaran teologis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kuasa simbolik yang membentuk batas inklusi–eksklusi serta etos sosial umat Islam (Bourdieu, 2020). Untuk memperdalam pembacaan pada level teks dan fungsi sosial-ideologisnya, penelitian ini memanfaatkan elemen Analisis Wacana Kritis Fairclough (Fairclough, 2023).

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa perbedaan dan pertarungan dalam Islam kontemporer tidak semata terletak pada doktrin teologis, melainkan terutama pada cara bahasa keagamaan dikonstruksi dan dioperasikan sebagai sarana legitimasi otoritas dan pembentukan identitas. Bertolak dari kerangka tersebut, masalah utama penelitian ini terletak pada bagaimana politik bahasa Islam beroperasi sebagai arena kontestasi otoritas dan identitas dalam pemikiran Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme di era kontemporer. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana politik bahasa digunakan oleh masing-masing arus pemikiran untuk membangun dan melegitimasi otoritas keagamaan; dan (2) bagaimana penggunaan istilah, diksi sakral, dan gaya retorika membentuk batas identitas, pola inklusi–eksklusi komunitas Muslim, serta melahirkan etos sosial yang berbeda dalam Islam kontemporer.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah literatur analitis dengan politik bahasa Islam Bernard Lewis sebagai kerangka analisis utama. Dalam kerangka ini, bahasa dipahami sebagai arena perebutan makna, otoritas, dan etos sosial. Oleh karena itu, analisis diarahkan pada cara istilah keagamaan, metafora teologis, dan gaya retorika digunakan oleh Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme untuk melegitimasi otoritas simbolik, membentuk batas inklusi–eksklusi, serta mengonstruksi orientasi moral dan sosial umat Islam. Kerangka Lewis memungkinkan pembacaan bahwa bahasa keagamaan tidak semata

merepresentasikan doktrin teologis, melainkan berfungsi sebagai strategi wacana dalam kontestasi otoritas dan identitas Islam kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dipilih secara purposif berdasarkan relevansi konseptual dan representativitas wacana, mencakup karya-karya akademik yang secara eksplisit merepresentasikan pemikiran masing-masing arus. Untuk Tradisionalisme, data primer meliputi karya René Guénon (*The Crisis of the Modern World*), Frithjof Schuon (*The Transcendent Unity of Religions*), dan Seyyed Hossein Nasr (*Traditional Islam in the Modern World*). Untuk Neo-Tradisionalisme, menggunakan disertasi Walaa Quisay (*Neo-Traditionalism in Islam in the West*), disertasi Brendan Peter Newlon (*American Muslim Networks and Neo-Traditionalism*), serta studi Murat van der Zee (*Between Traditionalism and Neo-Traditionalism*). Adapun Radikalisme menggunakan literatur global seperti John L. Esposito (*Unholy War: Terror in the Name of Islam*), Gilles Kepel (*Jihad: The Trail of Political Islam*), dan Olivier Roy (*Globalized Islam*), serta literatur regional yang relevan dengan konteks Asia Tenggara dan Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal bereputasi, dan laporan penelitian yang membahas politik bahasa, ideologi keagamaan, dan transformasi sosial Islam kontemporer.

Batasan penelitian ini terletak pada fokus analisis pemikiran dan wacana, bukan pada praktik sosial, dinamika organisasi, atau studi lapangan terhadap aktor dan komunitas tertentu. Penelitian ini tidak bertujuan menilai benar-salah ajaran atau efektivitas gerakan, melainkan membaca bagaimana bahasa keagamaan beroperasi sebagai instrumen legitimasi otoritas dan pembentukan identitas dalam masing-masing arus pemikiran. Dengan demikian, temuan penelitian bersifat analitis-interpretatif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara empiris. Analisis data dilakukan melalui pembacaan kritis bertahap dengan mengacu pada tiga orientasi utama politik bahasa Bernard Lewis: (1) perebutan otoritas makna, (2) identitas melalui pengaturan batas inklusi-eksklusi, dan (3) pembentukan etos sosial. Untuk memperdalam analisis pada level teks, digunakan elemen-elemen Analisis Wacana Kritis Fairclough, yang meliputi pemetaan istilah dan diksi kunci, penafsiran fungsi sosial-ideologisnya, serta penjelasan peran bahasa dalam dinamika otoritas dan identitas Islam kontemporer. Meskipun memanfaatkan perangkat analisis wacana, penelitian ini secara konsisten menempatkan politik bahasa Bernard Lewis sebagai kerangka sentral dalam memahami bagaimana ketiga arus pemikiran Islam membangun hegemoni makna melalui Bahasa.

3. Hasil dan Diskusi

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian sekaligus diskusi analitis yang menjadi kontribusi orisinal penulis. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung membahas Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme secara terpisah, penelitian ini menemukan bahwa ketiganya beroperasi dalam satu medan politik bahasa yang sama, di mana bahasa keagamaan berfungsi sebagai instrumen utama dalam kontestasi otoritas dan pembentukan identitas. Temuan orisinal penelitian ini

terletak pada pemetaan pola politik bahasa lintas arus pemikiran yang menunjukkan kesamaan mekanisme wacana, meskipun dengan orientasi ideologis yang berbeda.

3.1. Tradisionalisme: Genealogi Pemikiran dan Analisis Politik Bahasa

Tradisionalisme dalam konteks Islam kontemporer tidak dapat dipahami sekadar sebagai kecenderungan mempertahankan masa lalu, melainkan sebagai arus pemikiran metafisik dan spiritual yang menolak sekularisasi modern dan menghidupkan kembali makna *Tradition* sebagai sumber kebenaran transenden. Dalam sejarah intelektualnya, arus ini dimulai oleh René Guénon (1886–1951) di Prancis, dikembangkan oleh Frithjof Schuon (1907–1998), dan diperluas ke dalam horizon Islam oleh Seyyed Hossein Nasr (1933–Sekarang).

3.1.1. Genealogi Pemikiran Tradisionalisme (Guénon–Schuon–Nasr)

René Guénon (1886–1951) dipandang sebagai pelopor Traditionalist School dan perumus awal Perennialisme modern (HINGGIS, 2025). Ia melihat modernitas sebagai krisis spiritual karena manusia terputus dari realitas metafisik. Bagi Guénon, *Tradition* bukan adat turun-temurun, tetapi kebenaran ilahi yang ditransmisikan melalui jalur inisiasi yang sah. Pembedaan antara *Tradition* (T kapital) dan *tradition* (t kecil) menjadi strategi wacana untuk menegaskan otoritas kebenaran sakral atas budaya profan (Guénon, 2001). Baginya, pengetahuan sejati bersumber dari intuisi intelektual yang berakar pada wahyu dan dipandu oleh guru, bukan dari rasionalitas empiris modern.

Gagasan Guénon dikembangkan Frithjof Schuon (1907–1998), yang mengarahkan tradisionalisme ke dimensi esoteris dan mistik (Saumantri, 2023). Ia menegaskan bahwa agama-agama besar memiliki inti metafisik yang sama, yang disebutnya *Sophia Perennis* (Bara, 2025; Kania, 2014; Schuon, 2022). Melalui konsep kesatuan transenden agama-agama, Schuon memandang tradisi sebagai ilmu suci yang menjelaskan hubungan makhluk dengan Tuhan (Oldmeadow, 2010). Pilihan bahasanya memperluas tradisionalisme menjadi sistem spiritual universal yang mempertahankan hierarki sakral sambil merespons fragmentasi modernitas.

Seyyed Hossein Nasr (1933–sekarang) kemudian mematangkan dan mengkontekstualisasi gagasan tradisionalisme dalam Islam. Dalam *Traditional Islam in the Modern World*, ia menggambarkan Islam sebagai pohon kosmik: wahyu sebagai akar, syariah sebagai batang, dan mazhab sebagai cabang yang semuanya berakar pada satu sumber ilahi yaitu al-Qur'an dan Hadits (Nasr, 1994). Nasr menolak sekularisme, modernisme, dan fundamentalisme sebagai bentuk *pseudo-traditionalism* yang kehilangan kesadaran dan transmisi sacral (S. Hidayatullah et al., 2023; Nasr, 1996). Dengan menekankan *adab*, *sanad*, dan *barakah*, serta gagasan *sacred knowledge* dan *sacred science* (Akhwanudin, 2019; Nasr, 1989, 1993), ia memulihkan otoritas spiritual Islam melalui bahasa tradisi sebagai respons terhadap arus intelektual modern yang reduksionis.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tradisionalisme Guénon membangun fondasi metafisik, Schuon mengekspansi ke arah esoterisme universal, dan Nasr

mengislamkan serta mensistematisasikan warisan itu ke dalam struktur epistemik dan sosial Islam. Dalam konteks politik bahasa, genealoginya menggambarkan pergeseran dari bahasa filsafat (Guénon), menuju bahasa mistik universal (Schuon), hingga bahasa *turāth* dan traditional Islam (Nasr) yang ketiganya berfungsi untuk menegaskan otoritas sakral dan membangun etos sosial hierarkis-spiritual yang melawan desakralisasi modernitas.

3.1.2. Tradisionalisme dan Politik Bahasa: Struktur Kekuasaan Simbolik

Dalam kerangka politik bahasa, tradisionalisme memandang bahasa sebagai sarana untuk menegaskan tatanan pengetahuan dan otoritas keagamaan. Istilah-istilah yang digunakan oleh tokoh-tokohnya bukan sekadar konsep teoretis, melainkan alat legitimasi simbolik yang berfungsi menentukan siapa yang berhak berbicara atas nama kebenaran (Winarsih, 2013), siapa yang tergolong di dalam atau di luar komunitas keagamaan (Bourdieu, 2020), dan bagaimana etos sosial dibentuk dari proses transmisi makna tersebut (Fairclough, 2013). Menurut kerangka Bernard Lewis, bahasa keagamaan dalam Islam memiliki fungsi politis yang sangat halus: ia mendefinisikan kekuasaan melalui istilah sacral (Lewis, 1991). Dengan membaca konsep-konsep utama dari René Guénon, Frithjof Schuon, dan Seyyed Hossein Nasr, dapat terlihat bahwa setiap istilah memiliki dimensi ideologis yang membingkai kembali hubungan antara wahyu, ilmu, dan otoritas, seperti pada table berikut:

Tabel 1. Istilah Kunci Tradisionalisme dan Dimensi Politik Bahasa

No.	Tokoh	Istilah	Makna Ringkas	Fungsi Politik Bahasa	Etos Sosial
1	René Guénon	Tradition (kapital T)	Kebenaran metafisik abadi	Menentukan otoritas pengetahuan sakral	Etos hierarkis-spiritual
		tradition (huruf kecil)	Warisan budaya profan	Menetapkan batas eksklusif terhadap modernitas	Etos diferensiasi
		Crisis of the Modern World	Kritik terhadap modernitas	Membentuk oposisi simbolik terhadap rasionalisme	Etos perlawanan spiritual
2	Frithjof Schuon	Sophia Perennis	Kebijakan abadi semua agama	Mengklaim legitimasi universal kebenaran	Etos kosmopolitan spiritual
		Transcendent Unity of Religions	Kesatuan metafisik agama-agama	Menghapus batas sektarian dengan hirarki baru	Etos toleransi hierarkis
		Esoterism	Dimensi batin agama	Menentukan eksklusivitas makna	Etos introspektif-mistik
		Form and Essence	Lahir dan batin ajaran	Mengontrol tafsir; membedakan hakikat dan bentuk	Etos kritis terhadap formalitas
3	Seyyed H. Nasr	Traditional Islam	Islam yang berakar pada wahyu dan sanad	Menetapkan kriteria otentisitas Islam	Etos konservatif-intelektual
		Sacred	Pengetahuan	Menolak sekularisasi	Etos akademik-

Knowledge	suci berbasis wahyu	ilmu	spiritual
Pseudo-Traditionalism	Tradisi palsu tanpa kesakralan	Delegitimasi terhadap modernisme dan fundamentalisme	Etos penjaga kemurnian
Contra-tradition	Ideologi penentang tradisi	Mengidentifikasi musuh wacana tradisi	Etos defensif
Barakah (بركة)	Berkah ilahi dalam transmisi	Melegitimasi otoritas spiritual	Etos kesakralan sosial
Isnad / Silsilah	Rantai transmisi keilmuan	Menentukan keabsahan otoritas guru	Etos hierarki keilmuan
Mujaddid (مُجَدِّد)	Pembaru dalam kerangka tradisi	Mengatur keseimbangan antara inovasi dan kesinambungan	Etos kontinuitas kreatif

Setiap istilah pada tabel di atas dapat dibaca sebagai simbol kuasa dalam wacana keagamaan. Dalam kerangka Bernard Lewis, bahasa keagamaan mengandung tiga dimensi kekuasaan simbolik: menentukan otoritas makna, mengatur batas inklusi dan eksklusi, serta membentuk etos sosial kolektif.

Istilah *Tradition* yang diperkenalkan Guénon menunjukkan otoritas epistemik tertinggi. Dengan membedakannya dari *tradition* yang huruf kecil, Guénon menegaskan siapa yang berhak berbicara atas nama kebenaran. Dalam praktik wacana, hal ini menyingkirkan modernitas ke wilayah yang profan (Rohmah & Mawardi, 2024). Istilah *Initiation* kemudian memperkuat mekanisme eksklusivitas dengan menuntut adanya guru sebagai penjaga pengetahuan suci, sehingga makna hanya dapat ditafsirkan melalui sanad (Zulaicha & Wulandari, 2025). Sementara *Orthodoxy* dan *Crisis of the Modern World* memperlihatkan upaya Guénon membangun oposisi antara dunia sakral dan dunia modern (Guénon, 2001). Bahasa ini berfungsi ganda: memelihara otoritas rohani sekaligus menegaskan batas komunitas yang hanya bisa dimasuki melalui proses inisiasi spiritual.

Dalam tahap berikutnya, Frithjof Schuon mengalihkan fungsi bahasa tradisionalisme menjadi lebih universal. *Sophia Perennis* dan *Transcendent Unity of Religions* memperluas wilayah kekuasaan makna dengan mengklaim kebenaran universal yang melampaui sekat agama formal (Saumantri, 2023). Namun, di balik bahasa universal ini tetap tersembunyi struktur kuasa simbolik, karena hanya mereka yang memahami dimensi esoterik yang dianggap memiliki otoritas sejati. Istilah *Esoterism* dan *Form and Essence* menjadi perangkat untuk mengatur siapa yang termasuk dalam lingkaran pengetahuan batin dan siapa yang terjebak dalam bentuk luar (Bourdieu, 2020). Etos sosial yang dihasilkan adalah etos mistik, introspektif, dan hierarkis, di mana kebenaran diletakkan di tangan segelintir kaum terinisiasi.

Seyyed Hossein Nasr kemudian menafsirkan kembali seluruh perangkat bahasa tersebut dalam kerangka Islam. *Traditional Islam* dan *Sacred Knowledge* menegaskan bahwa otoritas keilmuan sejati berada pada para ulama yang menjaga kesinambungan sanad keilmuan (Akhwanudin, 2019). Istilah *Pseudo-Traditionalism* dan *Contra-tradition* digunakan untuk menegaskan batas komunitas, dengan cara menolak kelompok modernis dan fundamentalis yang dianggap kehilangan kesakralan (Nasr, 1994; Nurcholis & Hasanah, 2022). Melalui *Turāth* dan *Isnad*, Nasr menciptakan bahasa legitimasi yang menghubungkan masyarakat Islam modern dengan akar klasiknya, sementara *Barakah* berfungsi membangun disiplin sosial yang menanamkan rasa hormat terhadap guru dan tatanan spiritual (Syamâ, 2014; Zulaicha & Wulandari, 2025). Istilah *Mujaddid* memperlihatkan bagaimana Nasr mengatur keseimbangan antara kontinuitas tradisi dan inovasi keilmuan (Landau-Tasseron, 1989), menjadikan ilmu pengetahuan bagian dari pengabdian spiritual. Jika ditinjau secara keseluruhan, keseluruhan istilah ini membentuk sistem wacana yang menyatukan dimensi metafisik, sosial, dan epistemologis dalam satu tatanan simbolik. Dengan bahasa tersebut, para tokoh tradisionalis tidak hanya mempertahankan kesucian pengetahuan, tetapi juga menegaskan struktur otoritas sosial yang berbasis hierarki spiritual. Sejalan dengan pandangan Lewis (1991), bahasa dalam tradisionalisme berfungsi sebagai *arsitektur kuasa simbolik* yang menentukan siapa yang sah menafsirkan agama, siapa yang tergolong sebagai anggota komunitas spiritual, serta nilai-nilai sosial yang harus dijaga dalam menghadapi modernitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi Tradisionalisme dalam politik bahasa Islam tidak hanya terletak pada konservasi tradisi, tetapi pada kemampuannya membangun otoritas keagamaan melalui bahasa kontinuitas dan legitimasi historis. Pembacaan ini merupakan temuan analitis penulis yang menempatkan Tradisionisme sebagai aktor aktif dalam kontestasi wacana, bukan sekadar pewaris pasif tradisi.

3.2. Neo-Tradisionisme: Bahasa Otentisitas dan Sanad sebagai Arena Identitas Modern

Neo-Tradisionisme muncul pada paruh akhir abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dua kekuatan besar: sekularisme modern dan puritanisme Salafi. Gerakan ini tidak semata melanjutkan tradisionisme metafisik Guénon atau Schuon, tetapi menafsirkan ulang konsep *Tradition* dalam konteks modernitas global dan masyarakat diaspora Muslim. Menurut Walaa Quisay (W. H. Quisay, 2023) dan Brendan Peter Newlon, *neo-traditionalism* adalah upaya sadar (*conscious revival*) untuk menghidupkan kembali otoritas pra-modern Sunni yang berbasis sanad, mazhab, dan guru (*shaykh*) dalam dunia pasca-modern yang terfragmentasi (Newlon, 2017). Dalam pandangan ini, otentisitas (*aṣālah*) bukan lagi sekadar prinsip metafisik, melainkan proyek sosial-linguistik untuk merekonstruksi makna tradisi dalam bahasa kontemporer.

Dalam konteks politik bahasa, Neo-Tradisionisme bergerak pada wilayah ambivalen: di satu sisi mempertahankan istilah klasik seperti, *isnād*, dan *‘ilm naqli*,

tetapi di sisi lain membingkainya dengan diksi modern seperti “*authenticity*,” “*blank slate islam*,” dan “*salafi burnout*.” Bahasa mereka mengandung kekuasaan simbolik yang khas, karena menegaskan *aṣālah* (otentisitas) sebagai kriteria utama keabsahan keislaman, dan pada saat yang sama melakukan negosiasi dengan bahasa modern yang lebih inklusif dan komunikatif (Rahardjo, 2007; Ting-Toomey, 1988). Neo-Tradisionalisme karenanya menjadi arena di mana otoritas ulama direkonstruksi, batas komunitas dinegosiasikan ulang, dan etos sosial dibentuk kembali melalui simbol-simbol keagamaan yang diperbarui.

Tabel 2. Istilah Kunci Neo-Tradisionalisme dan Dimensi Politik Bahasa

No.	Tokoh	Istilah	Makna Ringkas	Fungsi Politik Bahasa	Etos Sosial
1	Murat van der Zee	Between Traditionalism & Neo-Traditionalism	Perbedaan konsep tradisi filosofis vs gerakan sosial-keagamaan dalam praktik kontemporer	Menggunakan terminologi untuk mengklasifikasi aktor; memberi kerangka inklusi akademik	Etos kategorial: pembedaan analitik yang mempengaruhi klaim otoritas
		‘ilm naqlī (transmitted knowledge)	Pengetahuan yang diteruskan secara naratif dan sanad, bukan eksklusif rasional	Menandai otoritas tradisional yang berbasis transmisi; menolak pengukuran modern semata	Etos penghargaan pada tradisi lisan/tekstual sebagai sumber legitimasi
		ṭarīqa	Jejaring tarekat yang mengalami revitalisasi praktek sufi dan ritual	Nama istilah yang memberi otorisasi hubungan spiritual kolektif dan jalur sanad; berbeda dari sekedar label budaya	Etos komunitarian sufistik, disiplin ritual dan hierarki tarekat
2	Brendan Peter Newlon	“Alternative” identity	Identitas keagamaan yang bukan sekadar etnis atau politik, melainkan pilihan spiritual praktis	Membuka inklusi pada anggota baru yang memilih jalur neo-tradisional; sekaligus menegaskan batas terhadap bentuk Islam lain	Etos pilihan identitas: personal, praktek-terikat, komunitas berbasis keserupaan praksis
		Digital isnād / digital sanad	Reproduksi bukti hubungan guru-murid melalui media digital (rekaman, ijazah online)	Memperluas pengakuan otoritas ke ranah digital; menguji batas inklusi (siapa terverifikasi)	Etos verifikasi hybrid: tradisi + teknologi
		Networked ulama / Networked communities	Konstelasi ulama, madrasah, lembaga, dan murid yang terhubung lintas negara	Menstandarisasi legitimasi melalui endorsement jaringan; menggeser locus otoritas ke jejaring	Etos loyalitas jaringan, solidaritas transnasional

3	Walaa Quisay	Aṣālah (authenticity)	Klaim bahwa praktik/ajaran adalah otentik terhadap warisan pra-modern	Menentukan siapa 'asli' dan siapa tidak; memarginalkan pembacaan yang dianggap modern/sekuler atau populis	Etos historis-integritas; penghormatan pada sanad dan asal-usul
		Shaykhs	Pemimpin spiritual/transmisi yang menjadi pusat otoritas praktik neo-tradisional di Barat	Memberi otorisasi makna melalui persona guru; membuat klaim legitimasi berbasis sanad/otoritas personal	Etos karismatik-guru, loyalitas murid, pemujaan terhadap otoritas keagamaan
		Salafi burnout	Fenomena kelelahan kritis di kalangan pengikut Salafi yang beralih	Digunakan untuk menjelaskan ruang yang diambil neo-tradisional sebagai alternatif; menandai kegagalan retorik Salafi	Etos ketahanan reflektif; ruang rekonstruksi spiritual bagi mereka yang kecewa
		"Blank slate" Islam (framing of shaykhs' whiteness)	Ide bahwa authority yang diasosiasikan dengan shaykhs berkulit putih memberi kesan netral/antarbudaya	Mendiamkan konteks iman budaya lokal; menjadikan shaykh sebagai titik pengidentifikasi otoritas tanpa beban kultural	Etos universalisasi yang menyamakan perbedaan etnis dan politik lokal

Tabel di atas tidak sekadar merangkum terminologi, melainkan memetakan bagaimana bahasa berfungsi sebagai arena kuasa dan representasi identitas dalam wacana Islam kontemporer. Setiap istilah yang digunakan oleh Murat van der Zee, Brendan Peter Newlon, dan Walaa Quisay menunjukkan bahwa neo-tradisionalisme bukan hanya fenomena intelektual atau spiritual, tetapi juga sebuah praktik *politik bahasa* yang mengatur otorisasi makna, menata batas komunitas, dan membentuk etos sosial baru di tengah dinamika globalisasi dan sekularisasi modern (Newlon, 2017; W. H. Quisay, 2023; Zee, 2023).

Murat van der Zee memandang *Neo-Tradisionalisme* sebagai ruang analitik yang menjembatani *Traditionalism* filosofis dan gerakan sosial-keagamaan kontemporer. Melalui terminologi seperti '*ilm naqlī*' dan '*ṭarīqa*', ia menunjukkan bahwa bahasa tradisi berfungsi sebagai mekanisme legitimasi epistemic yang menentukan siapa yang berhak menafsirkan dan bagaimana pengetahuan ditransmisikan secara sah (Bourdieu, 1991). Dalam kerangka politik bahasa Bernard Lewis, istilah-istilah ini menjadi perangkat otorisasi makna: '*ilm naqlī*' menegaskan otoritas berdasarkan sanad, sementara '*ṭarīqa*' menandai komunitas spiritual yang hierarkis dan tertib (Lewis, 1991). Dengan demikian, van der Zee menampilkan bagaimana bahasa keilmuan klasik direvitalisasi untuk mengatur inklusi–eksklusi keilmuan sekaligus membentuk *etos sosial sufistik* (Alamsyah, 2024) yang menekankan disiplin, penghormatan, dan hierarki spiritual dalam masyarakat Muslim global.

Brendan Peter Newlon menjelaskan bagaimana istilah seperti *Networked Ulama*, *Digital Isnād*, dan *Alternative Identity* menjadi instrumen bahasa baru bagi neo-tradisionalisme di Amerika (Newlon, 2017). Dalam perspektif politik bahasa,

istilah-istilah ini menggeser locus otoritas dari figur individual ke jaringan sosial yang terverifikasi dan terhubung secara global (Lewis, 1991). Bahasa jaringan ini menegaskan legitimasi kolektif, membatasi inklusi melalui koneksi sanad digital (Sauri & FARHAH, 2024), dan sekaligus membuka ruang bagi identitas Islam yang dapat dipilih secara sadar (Syamâ, 2014). Dengan demikian, Newlon menunjukkan bahwa bahasa keislaman dalam konteks ini berfungsi ganda, yaitu mengatur distribusi otoritas dan membentuk *etos sosial baru* yang menyeimbangkan kontinuitas tradisi dengan adaptasi modern, di mana kesetiaan terhadap sanad kini dimediasi oleh teknologi dan jejaring global.

Walaa Quisay memusatkan analisisnya pada bahasa otentisitas (*aşālah*) dan figur karismatik para *shaykh* seperti Hamza Yusuf dan Abdal Hakim Murad, yang menggunakan otoritas sanad dan simbol kesucian untuk membangun legitimasi di masyarakat Barat (W. H. Quisay, 2023). Dalam kerangka politik bahasa Islam, istilah seperti *aşālah*, *Salafi burnout*, dan “*Blank Slate*” Islam berfungsi sebagai alat retorik untuk merebut makna keaslian, menegaskan batas komunitas, dan menegosiasikan identitas universal (Bourdieu, 2020). Melalui bahasa tersebut, Quisay menunjukkan bagaimana otentisitas dijadikan kekuasaan simbolik, baik untuk membedakan neo-tradisionalisme dari Salafisme maupun untuk memproduksi *etos sosial universalistis* yang tampak inklusif namun menyimpan bias kultural dan rasial (Elkarimah, 2016; Nurdin, 2020). Neo-tradisionalisme, dalam pandangan Quisay, adalah arena di mana bahasa religius bekerja sebagai alat hegemoni makna dan rekonstruksi identitas spiritual pasca-modern. Temuan orisinal penelitian ini memperlihatkan bahwa Neo-Tradisionalisme tidak sekadar menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, tetapi berfungsi sebagai ruang negosiasi otoritas yang aktif melalui rekontekstualisasi bahasa turāth dalam lanskap global-digital.

3.3. Radikalisme: Bahasa Pemurnian dan Politik Eksklusi Ideologis

Bahasa radikalisme dalam konteks Islam selalu beroperasi sebagai *bahasa kekuasaan moral* yang berupaya meneguhkan legitimasi melalui simbol kesucian, kemurnian, dan perjuangan (Abdullah, 2016). Jika neo-tradisionalisme menegaskan otoritas melalui sanad dan adab, maka radikalisme meneguhkannya melalui diksi pemurnian dan militansi moral (Muhaimin, 2020). Dalam kerangka politik bahasa Bernard Lewis, istilah-istilah seperti *jihad*, *tathhīr* (pemurnian), *bid'ah*, *takfīr*, dan *khilāfah* bukan hanya memiliki makna teologis, tetapi berfungsi untuk mengatur siapa yang dianggap “benar” dan siapa yang “menyimpang”, siapa yang termasuk umat sejati dan siapa yang kafir atau sesat (Bourdieu, 2020). Bahasa semacam ini menjadi alat eksklusi simbolik yang menghasilkan etos sosial yang kaku, puritan, dan konfrontatif.

Radikalisme sebagai arus pemikiran Islam kontemporer tidak lahir dari ruang hampa; ia berkembang dari dialektika panjang antara puritanisme klasik (Ibn Taymiyyah dan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb), ideologi politik modern (Sayyid Qutb dan Abul A‘lā al-Maududi), hingga ekspresi pasca-9/11 yang menjadikan “identitas Islam” sebagai alat resistensi terhadap hegemoni Barat (Sony Amrullah, 2018). Di Indonesia, seperti dijelaskan dalam karya *Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* dan *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia* (Syahril, 2020), bahasa radikalisme juga menjadi bagian dari pertarungan identitas kelas menengah terdidik yang merasa kehilangan pusat moral di tengah modernitas (Jati, 2017). Fenomena ini memperlihatkan bahwa radikalisme bukan hanya proyek ideologis, tetapi juga proyek linguistic yaitu upaya menguasai makna-makna kunci Islam untuk mengontrol arah wacana keagamaan dan sosial-politik.

Tabel 3. Istilah Kunci Radikalisme dan Dimensi Politik Bahasa

No.	Sumber / Tokoh	Istilah	Makna Ringkas	Fungsi Politik Bahasa	Etos Sosial
1	Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb (abad 18)	<i>Tathhīr</i> (pemurnian)	Pembersihan Islam dari praktik <i>bid‘ah</i> dan <i>shirk</i>	Menentukan siapa yang dianggap Muslim sejati; mendeligitimasi tradisi sufistik	Etos puritan: kesalehan keras dan oposisi terhadap sinkretisme
2	Ibn Taymiyyah	<i>Amr bi al-ma‘rūf wa nahy ‘an al-munkar</i>	Kewajiban moral untuk memerangi kemungkaran	Mengatur legitimasi tindakan sosial-agresif atas nama kebenaran	Etos militansi moral dan pengawasan sosial
3	Sayyid Qutb	<i>Jāhiliyyah</i> modern	Dunia modern dianggap sebagai kebodohan spiritual baru	Menjustifikasi perjuangan menegakkan tatanan Islam	Etos perjuangan dan oposisi total terhadap Barat
4	Abul A‘lā al-Maududi	<i>Hākimiyyat Allāh</i> (kedaulatan Tuhan)	Tuhan sebagai satu-satunya sumber hukum	Menggeser otoritas politik ke domain teologis; menolak demokrasi sekuler	Etos kepasrahan total dan penegakan tatanan ilahi
5	Kelompok jihadis global (post-9/11)	<i>Jihād</i> dan <i>shahādah</i>	Perjuangan bersenjata untuk menegakkan keadilan Tuhan	Mengklaim otoritas moral atas kekerasan religius	Etos pengorbanan dan heroisme ekstrem
6	Wacana lokal Indonesia	<i>Amar ma‘rūf nahi munkar</i> (versi gerakan sosial)	Seruan moral menjadi slogan aksi kolektif	Alat mobilisasi sosial dan legitimasi moral publik	Etos partisipasi moral dan kepatuhan kolektif
7	Wacana gerakan politik	<i>Khilāfah</i>	Tatanan politik global ideal umat Islam	Bahasa ideologis untuk menyatukan umat dan menolak negara-bangsa	Etos utopian-komunal dan anti-nasionalisme
8	Diskursus populis pasca 2010	<i>Hijrah</i>	Transformasi moral individu ke arah kesalehan total	Mengatur moralitas sosial dan performa keislaman publik	Etos kesalehan konsumtif dan moralitas performatif

9	Diskursus kontemporer	<i>Takfir</i>	Pengkafiran terhadap kelompok lain	Alat delegitimasi ideologis terhadap lawan politik dan teologis	Etos intoleransi dan polarisasi internal
---	-----------------------	---------------	------------------------------------	---	--

Bahasa radikalisme, dalam kerangka Bernard Lewis, berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang mendefinisikan batas legitimasi keislaman. Istilah seperti *tathhīr* dan *bid'ah* menjadi alat klasifikasi moral, membedakan antara yang “murni” dan yang “tercemar” (Soufan, 2019). Dalam konteks ini, pemurnian tidak sekadar tindakan teologis, melainkan proyek linguistik yang menyingkirkan bahasa tradisi sufistik seperti *barakah*, *ṭarīqa*, atau *sanad* yang dianggap sarat dengan “penyimpangan” (Nasution, 2024). Dengan menegaskan dikotomi *tauhid*–*syirik*, radikalisme menciptakan bahasa oposisi yang kaku: “kita” versus “mereka”, “Islam murni” versus “Islam budaya” (Muslikhah & Umar, 2019). Melalui bahasa ini, otoritas berpindah ke figur pengkhotbah atau ideolog yang mengklaim akses langsung ke kebenaran Al-Qur'an tanpa perantara sanad keilmuan (Hasanah, 2015; Zuhri, 2019). Dengan demikian, fungsi politik bahasa radikalisme adalah menegaskan monopoli atas makna kebenaran, sekaligus mendeligitimasi sumber-sumber otoritas tradisional.

Pada tingkat praksis sosial, bahasa radikalisme juga membentuk etos sosial tertentu. Dalam konteks jihadisme global, istilah seperti *jihad* dan *shahādah* membangun etos pengorbanan heroik yang menjustifikasi kekerasan atas nama Tuhan (Asbanu & Messakh, 2025). Di Indonesia, bahasa serupa diadaptasi ke dalam istilah *hijrah* dan *amar ma'rūf nahi munkar*, yang berfungsi sebagai simbol moralitas sosial, terutama di kalangan kelas menengah Muslim urban (Jati, 2017). Gerakan ini menggunakan bahasa religius untuk mengontrol perilaku, mengatur ekspresi publik, dan menandai keanggotaan moral masyarakat. Seperti diungkap dalam *Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* istilah “hijrah” tidak lagi sekadar perjalanan spiritual, tetapi menjadi penanda identitas sosial yang dikomodifikasi menjadi suatu bentuk *politik bahasa kesalehan* (Jati, 2017). Dengan demikian, radikalisme membentuk *etos sosial performatif* di mana kesalehan ditunjukkan melalui simbol bahasa, busana, dan perilaku yang seragam.

Sementara itu, bahasa *deradikalisasi* muncul sebagai kontra-wacana yang juga beroperasi secara politik (Mustofa, 2011; Zuhdi, 2017). Istilah seperti *wasatiyyah* dan *rahmatan li al-‘ālamīn* digunakan untuk menegosiasikan kembali citra Islam sebagai agama damai dan inklusif (Zulkarnain, 2023). Dalam perspektif Lewis, bahasa moderasi ini berfungsi untuk menjadi penengah guna menetralkan legitimasi moral dari kelompok radikal, sekaligus menyeimbangkan otoritas negara dan lembaga resmi dalam mengatur tafsir keagamaan (Bourdieu, 2020; Lewis, 1991). Dengan demikian, baik radikalisme maupun deradikalisasi meskipun sama-sama menggunakan bahasa sebagai alat kontrol sosial dan ideologis, bedanya, radikalisme menekankan *otoritas eksklusif dan pemurnian makna*, sedangkan deradikalisasi berfokus pada *rekonstruksi inklusif* untuk membangun etos sosial

koeksistensial. Analisis ini menemukan bahwa Radikalisme memanfaatkan politik bahasa pemurnian bukan hanya sebagai ekspresi ideologi, tetapi sebagai strategi diskursif sistematis untuk mengklaim otoritas kebenaran tunggal dan membentuk identitas eksklusif. Temuan ini menegaskan dimensi politik bahasa yang sering tereduksi dalam kajian radikalisme berbasis keamanan atau ideologi.

Secara keseluruhan, temuan orisinal penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa politik bahasa Islam merupakan ruang analitis bersama yang mempertautkan Tradisionalisme, Neo-Tradisionalisme, dan Radikalisme dalam satu arena simbolik. Meskipun berbeda secara ideologis, ketiganya menggunakan mekanisme bahasa yang serupa, yaitu legitimasi otoritas, pengaturan inklusi–eksklusi, dan pembentukan etos sosial untuk meneguhkan posisi masing-masing. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada kajian pemikiran Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka lintas arus yang menempatkan bahasa sebagai sumbu utama kontestasi otoritas dan identitas.

4. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa pertarungan antara *Tradisionalisme*, *Neo-Tradisionalisme*, dan *Radikalisme* dalam Islam kontemporer sejatinya merupakan pertarungan atas bahasa dan makna, bukan semata perbedaan teologis. Dalam kerangka Bernard Lewis, bahasa di sini berfungsi sebagai arena perebutan otoritas simbolik, di mana setiap arus menggunakan istilah, gaya retorika, dan diksi sakral untuk menentukan siapa yang berhak berbicara atas nama Islam. Tradisionalisme mempertahankan *otorisasi makna* melalui bahasa kesakralan seperti *Tradition*, *mujaddid*, dan *sanad* yang menegaskan kesinambungan spiritual dan adab keilmuan. Neo-Tradisionalisme kemudian memperluas ruang itu dengan merevitalisasi istilah klasik seperti *aşālah*, *ṭarīqa*, dan *digital isnād*, menjadikannya alat legitimasi baru dalam dunia global dan digital. Sebaliknya, Radikalisme mengubah bahasa Islam menjadi perangkat eksklusif ideologis, menggunakan istilah seperti *tathhīr*, *bid'ah*, *takfīr*, dan *khilāfah* untuk menegaskan batas identitas dan monopoli atas kesalehan.

Bahasa keagamaan dalam tiga arus ini juga menjadi sarana untuk mengatur batas komunitas yaitu fungsi kedua dalam kerangka Lewis. Tradisionalisme menciptakan batas melalui hierarki guru dan sanad; Neo-Tradisionalisme menegakkannya melalui jaringan otoritas dan etika wacana modern; sedangkan Radikalisme mempersempitnya dengan dikotomi antara yang “murni” dan yang “menyimpang”. Pertarungan semantik ini melahirkan berbagai bentuk *etos sosial*: dari etos adab dan kesantunan spiritual dalam tradisi klasik, menuju etos jaringan dan moderasi dalam neo-tradisionalisme, hingga etos puritan dan konfrontatif dalam radikalisme. Bahasa menjadi jantung dari praksis sosial ini, karena melalui bahasa, nilai dan identitas kolektif disusun, dipelihara, dan dikontrol.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya membaca ketiga arus tersebut melalui kacamata politik bahasa, bukan semata dari teologi atau sosiologi agama. Analisis ini menegaskan bahwa perubahan dalam wacana Islam tidak hanya terjadi pada tingkat doktrin, tetapi pada cara istilah keagamaan dikonstruksi dan

dioperasikan sebagai simbol kekuasaan. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi studi keislaman adalah membangun *etika bahasa religius* yang mampu mengembalikan fungsi bahasa sebagai jembatan makna, bukan senjata eksklusif. Dalam dunia yang ditandai oleh polarisasi dan disinformasi, masa depan Islam bergantung pada kemampuan para pemikir, pendidik, dan pemuka agama untuk menata ulang bahasa keagamaan sebagai ruang dialog, bukan dominasi, juga sebagai sarana pembentukan etos sosial yang menyatukan dan beradab.

5. Daftar Pustaka

- Abadi, M. Z. (2024). Politik Identitas Di Panggung Demokrasi: Melihat Simbol Agama Melalui Lensa Habitus Dan Dramaturgi. *Politik Islam*, 3(2), 96–117.
- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. *Addin*, 10(1), 1–28.
- Akhwanudin, A. (2019). *SCIENTIA SACRA: Urgensi Sains Tradisional Terhadap Dekadensi Nilai Dalam Sains Modern*. Penerbit NEM.
- Alamsyah, A. A. (2024). Menavigasi Pendidikan Moral Di Institusi Islam Melalui Kearifan Sufistik. *PROGRESSA: Journal Of Islamic Religious Instruction*, 8(1), 43–55.
- Asbanu, N., & Messakh, J. (2025). KEKERASAN ATAS NAMA TUHAN: POLITIK IDENTITAS DAN RESPON TEOLOGI KONTEKSTUAL DI INDONESIA. *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen*, 6(2), 110–125.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. Kencana.
- Azra, A. (2019). Terorisme, Radikalisme Dan Fundamentalisme. *Siasat*, 4(1), 13–17.
- Bara, U. A. (2025). Fritjhof Schuon's Contribution To The Development Of Sufism In The West. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 265–275.
- Barton, G. (2005). *Jemaah Islamiyah: Radical Islamism In Indonesia*. NUS Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language And Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa Dan Kekuasaan Simbolik*. Ircisod.
- Elkarimah, M. F. (2016). Etos Kerja Islami Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 3(2), 232–248.
- Esposito, J. L. (2003). *Unholy War: Terror In The Name Of Islam*. Oxford University Press.
- Fairclough, N. (2013). *Language And Power*. Routledge.
- Fairclough, N. (2023). Critical Discourse Analysis. In *The Routledge Handbook Of Discourse Analysis* (Pp. 11–22). Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003035244-3/critical-discourse-analysis-norman-fairclough>
- Guénon, R. (2001). *The Crisis Of The Modern World*. Sophia Perennis.
- Guénon, R. (2009). *The Essential René Guénon: Metaphysics, Tradition, And The Crisis Of Modernity*. World Wisdom, Inc.
- Hasanah, U. (2015). Pesantren Dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab Dan Sanad Keilmuan. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 8(2), 203–224.

- Hidayatullah, R. (2024). Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru Di Ruang Digital. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 10, 1–12.
- Hidayatullah, S., Arif, M., & Kuswanjono, A. (2023). Seyyed Hossein Nasr's Perennialism Perspective For The Development Of Religious Studies In Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 33(2), 357–376.
- HINGGIS, Y. (2025). *RENÉ GUÉNON MAHA GURU FILOSOF MUSLIM BARAT KONTEMPORER*.
- Jati, W. R. (2017). Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia Pasca Reformasi. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 192–208.
- Kania, D. D. (2014). Kajian Kritis Pemikiran Epistemologi Frithjof Schuon (1907–1998). *TSAQAFAH*, 10(1), 85–108.
- Kepel, G. (2002). *Jihad: The Trail Of Political Islam*. Harvard University Press.
- Kepel, G. (2003). *Muslim Extremism In Egypt: The Prophet And Pharaoh*. Univ Of California Press.
- Landau-Tasseron, E. (1989). The " Cyclical Reform": A Study Of The Mujaddid Tradition. *Studia Islamica*, 70, 79–117.
- Lewis, B. (1991). *The Political Language Of Islam*. University Of Chicago Press.
- Muhaimin, H. A. (2020). *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama*. Rasibook.
- Muslikhah, N., & Umar, M. A. C. (2019). SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM DI NUSANTARA. *Sustainability(Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Mustofa, I. (2011). Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem Dan Solusinya. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 247–264.
- Nasr, S. H. (1989). *Knowledge And The Sacred: Revisioning Academic Accountability*. Suny Press.
- Nasr, S. H. (1993). *The Need For A Sacred Science*.
- Nasr, S. H. (1994). *Traditional Islam In The Modern World*. Kegan Paul International.
- Nasr, S. H. (1996). *The Islamic Intellectual Tradition In Persia*. Psychology Press.
- Nasution, M. A. (2024). Beragama Kontekstual Dan Prinsip Dasar Modernisasi: Antara Pembaharuan Dan Pemurnian. *Jurnal Al-Harakah*, 35–43.
- Newlon, B. P. (2017). *American Muslim Networks And Neotraditionalism*.
- Nurcholis, A., & Hasanah, M. (2022). *Gagasan Scientia Sacra Seyyed Hossein Nasr Dan Implikasinya Dalam Kebijakan Pendidikan Bahasa Arab*. 1.
- Nurdin, F. (2020). Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Etos Kerja. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(1), 137–150.
- Nurhamidin, B., Mokodenseho, S., Mokodompit, H., Bahansubu, A., & Rumondor, P. (2025). TRANSFORMASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA DIGITAL, ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERGESERAN POLA OTORITAS ULAMA DI MEDIA SOSIAL. *Journal Of Educational And Religious Perspectives*, 1(1), 39–48.
- Oldmeadow, H. (2010). *Frithjof Schuon And The Perennial Philosophy*. World Wisdom, Inc.
- Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.

- Quisay, W. (2019). The Neo-Traditionalist Critique Of Modernity And The Production Of Political Quietism. *Political Quietism In Islam: Sunni And Shi'i Practice And Thought*, 241–258.
- Quisay, W. H. (2023). *Neo-Traditionalism In Islam In The West: Orthodoxy, Spirituality And Politics*. Edinburgh University Press.
- Rahardjo, M. (2007). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Publik Dan Pembangunan Wacana. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 2(1).
- Rahman, M. T. (2020). *Agama, Kekerasan Dan Radikalisme*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rohmah, N., & Mawardi, K. (2024). Respon Islam Terhadap Modernitas Barat. *Transformasi Manageria: Journal Of Islamic Education Management*, 4(1), 42–52.
- Saumantri, T. (2023). Kesatuan Transenden Di Tengah Pluralisme Agama: Sebuah Interpretasi Pemikiran Frithjof Schuon. *Journal Of Religion And Social Transformation*, 1(1), 34–50.
- Sauri, M. S., & FARHAH, F. (2024). KOMUNITAS ISLAM DIGITAL: IDENTITAS SOSIAL DAN PERUBAHAN ABAD KE-21. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 3(02), 20–28.
- Schuon, F. (2011). *Understanding Islam: A New Translation With Selected Letters*. World Wisdom, Inc.
- Schuon, F. (2022). *Letters Of Frithjof Schuon: Reflections On The Perennial Philosophy*. Simon And Schuster.
- Sedgwick, M. (2004). *Against The Modern World: Traditionalism And The Secret Intellectual History Of The Twentieth Century*. Oxford University Press.
- Sony Amrullah. (2018). Melacak Jejak Radikalisme Dalam Islam: Akar Ideologis Dan Eksistensinya Dari Masa Ke Masa. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.29062/Dirasah.V1i2.5>
- Soufan, A. (2019). *Tradition And Its Boundaries: A Diachronic Study Of The Concept Of Bid'ah (Religious Innovation) In Early Islam*.
- Syahril, A. (2020). Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia. Penerbit CV. Zigie Utama Anggota IKAPI Nomor, 3.
- Syamâ, M. (2014). Khabar Sadiq; Sebuah Metode Transmisi Ilmu Pengetahuan Dalam Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(1), 91–108.
- Ting-Toomey, S. (1988). A Face Negotiation Theory. *Theory And Intercultural Communication*, 47–92.
- Winarsih, S. (2013). Representasi Bahasa Dalam Pertarungan Simbolik Dan Kekuasaan. *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 5(1), 11–24.
- Zee, M. Van Der. (2023). *Between Traditionalism & Neo-Traditionalism: A Closer Look At Two Schools Of Western Islam And Their Critique Of Modernity* [Dissertation, Universiteit Leiden]. <https://hdl.handle.net/1887/3657177>
- Zuhdi, M. H. (2017). Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 199–224.

- Zuhri, A. M. (2019). *Sanad Ideologi Radikal; Jejak Historis Dan Pengaruh Doktrin Khawarij Dalam Organisasi Teror Dunia*. Nawa Litera Publishing.
- Zuhri, A. M. (2021). *Beragama Di Ruang Digital; Konfigurasi Ideologi Dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual*. Nawa Litera Publishing.
- Zulaicha, M. J. R. D., & Wulandari, Y. (2025). *TRANSMISI PENGETAHUAN LISAN DAN METODE PEMBELAJARAN DALAM TRADISI KEILMUAN ISLAM*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Zulkarnain, Z. (2023). MOBILISASI POLITIK ISLAM MODERAT DI INDONESIA. *PROSIDING SNITT POLTEKBA*, 6, 203–210.